



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 04 Januari 2017

Halaman: 15

Tujuh Jabatan Kepala OPD Kosong

YOGYA, TRIBUN - Seditiknya tujuh jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Yogyakarta mengalami kekosongan. Untuk sementara waktu ini, tujuh jabatan tersebut akan diampu oleh pelaksana tugas (PLT) karena hingga saat ini belum ada seleksi terbuka untuk pengisian jabatan ini. Kekosongan jabatan ini terancam akan berlangsung selama hampir setahun sampai menunggu dilantik wali kota definitif.

Tujuh jabatan yang mengalami kekosongan pejabat ini adalah Sekretaris Dewan (Sekwan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Sandi, Asisten I Bidang Pemerintahan, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

"Saat ini memang ada tujuh (OPD) yang masih kosong jabatannya. Sementara diisi oleh Plt sampai nanti ada pejabat definitifnya," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Maryoto, usai selamatan dan pengambian sumpah jabatan ratusan pejabat eselon II, III, dan IV di kantor Pemkot setempat, Selasa (3/1).

Dia menjelaskan, untuk Plt yang mengampu tujuh ja-

STORY HIGHLIGHT

- jabatan kepala OPD yang kosong akan diisi oleh pelaksana jabatan sampai ada pejabat definitif
- Pemkot Yogyakarta belum bisa melakukan seleksi terbuka sampai enam bulan pascawali kota dilantik pascapilkada mendatang
- Namun Penjabat Wali Kota bisa mengajukan izin ke Kemendagri untuk bisa melakukan pengisian pejabat eselon II

batan tersebut bisa diisi oleh pejabat eselon yang setara yakni eselon II B. Jika tidak, kekosongan ini juga bisa diisi oleh sekretaris dinas yang saat ini masih menjabat di instansi tersebut.

Menurut Maryoto, kekosongan jabatan ini bisa segera diisi dengan adanya seleksi jabatan terbuka. Hal ini, kata dia, bisa dilaksanakan oleh Penjabat Wali Kota dengan memohon izin pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Atau, menunggu wali kota definitif.

Hanya saja, jika pengisian jabatan dilaksanakan oleh wali kota definitif, maka harus menunggu selama enam bulan setelah dilantik. Jika

diperkirakan dari tanggal pelantikan Wali Kota definitif yakni Mei tahun 2017, maka seleksi terbuka baru bisa dilakukan setelah bulan November 2017 mendatang.

"Kalau seleksi terbuka dilakukan oleh Plt Wali Kota, maka harus seizin dari Kemendagri. Itu tergantung Plt-nya," katanya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Yogyakarta, Sulistyio menjelaskan, untuk sementara waktu kekosongan jabatan di tujuh OPD ini akan diisi oleh Plt kepala dinas dan badan. Hal ini karena terbatasnya waktu, sehingga belum ada seleksi jabatan terbuka untuk pengisian jabatan tersebut.

"Saat ini diisi Plt terlebih dahulu. Hal ini karena waktunya tidak memungkinkan," kata Sulistyio.

Dia mengatakan, untuk pengisian pejabat definitif di OPD yang mengalami kekosongan pejabat ini akan dilakukan seiring waktu berjalan. Pihaknya pun siap untuk meminta izin ke Kemendagri jika memang pengisian jabatan ini mendesak dilakukan. "(Untuk pengisian jabatan) nanti sambil jalan," katanya.

Lama
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Anggunur menjelaskan, nantinya memang pengisian jabatan ini masih harus menunggu wali kota definitif menjabat selama enam bulan. Selang itu, diperkirakan pada bulan November mendatang baru akan ada seleksi pengisian jabatan.

"Ya, paling tidak ada tujuh bulan kosong dan masih masa toleransi. Kami kira juga masih bisa berjalan dengan baik," katanya.

Dia menjelaskan, setelah pelantikan wali kota, proses pengisian jabatan harus bisa segera dilakukan. Pihaknya juga mendorong Pemkot Yogyakarta untuk mengajukan izin ke Kemendagri agar Penjabat Wali Kota bisa melakukan pengisian pejabat eselon II. (als)



PELANTIKAN - Ratusan pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemkot Yogyakarta dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Pelantikan pejabat itu untuk mengisi jabatan Organisasi Perangkat Daerah baru.

Tindak Lanjut	Tindak Lanjut
Segera	☐ Untuk Ditanggapi
	☒ Untuk Diketahui
	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala
Tid

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005